

ABSTRAK

Tantangan dalam penyelenggaraan telekomunikasi saat ini adalah penyebaran teknologi 5G diberbagai negara-negara maju. International Telecommunications Union – Radiocommunication Sector (ITU-R) telah menetapkan 3 kategori utama use case 5G, yaitu: Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Masive Machine-Type Communications (mMTC), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC). Adanya model use case 5G tersebut mendorong munculnya model bisnis atau kerjasama yang dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi. Dalam layanan 5G terdapat bentuk kerjasama yaitu B2B2X, yang mana “X” merupakan perusahaan (Business atau B), Pemerintah (Government atau G) maupun pengguna langsung (Customer atau C). Dari hasil implementasi model bisnis 5G di beberapa negara, terlihat adanya strategi kebijakan dan peran Pemerintah dan/atau Regulator yang berbeda-beda dalam mendorong penyelenggaraan 5G di negaranya, dan diperoleh gambaran terkait tantangan dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini difokuskan pada implementasi berbagi jaringan pada penyebaran 5G di Ibu Kota Negara (IKN) mengikuti dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi menggunakan Analisa Biaya-Manfaat untuk implementasi berbagi jaringan aktif atau dengan istilah lain disebut MORAN (Multi-Operator Radio Access Network), dimana terdapat beberapa operator yang berbagi komponen RAN tanpa melakukan berbagi spektrum. Hasil dari penelitian ini diperoleh efisiensi belanja modal (CAPEX) dan pengeluaran operasional (OPEX) sebesar 30%-40% pada penerapan berbagi jaringan aktif. Sehingga penerapan berbagi jaringan pada penyebaran teknologi 5G ini agar berjalan dengan baik dibutuhkan kebijakan dan/atau petunjuk teknis dalam penerapannya agar mendukung azas persaingan usaha yang sehat.

Kata kunci: 5G, model bisnis, IKN, berbagi jaringan, kebijakan